

# PATOLOGIS DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM WARUNG TEKAN INFLASI KOTA MADIUN

Oleh:

Rizky Dwi Aprilian  
Rutiana Dwi Wahyunengseh  
Asal Wahyuni Erlin Mulyadi



Bagian Umum  
Sekretariat Daerah Kota Madiun

## Executive Summary

Program Warung Tekan Inflasi (Wartek) di Kota Madiun bertujuan menekan inflasi melalui subsidi komoditas pangan yang didanai dari APBD dan CSR. Namun, implementasi program ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti pembengkakan anggaran hingga Rp 7,6 miliar dan masih tingginya inflasi Kota Madiun tahun 2022 sebesar 5,8%, melampaui target nasional  $3\% \pm 1\%$ . Permasalahan utama mencakup praktik kecurangan oleh pedagang, seperti menjual di atas HET, penggunaan timbangan tidak akurat, dan penjualan barang tidak layak. Kecurangan yang terjadi dijelaskan berdasarkan *principia l-agent theory* dan *rent-seeking theory* dimana perilaku pedagang yang memanfaatkan peluang untuk keuntungan pribadi disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan asimetri informasi. Rekomendasi kebijakan fokus pada sistem pengawasan subsidi dengan melibatkan pemerintah dalam mengontrol jumlah pasokan barang subsidi, inspeksi kualitas barang, dan memastikan praktik perdagangan yang adil dengan sosialisasi serta media komunikasi tidak langsung dengan masyarakat. Masyarakat juga berperan dalam sistem *whistle-blowing* agar program Wartek tepat sasaran dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat dan menekan inflasi.



**PATOLOGIS PADA PROGRAM WARUNG TEKAN INFLASI**

Warung tekan inflasi (Wartek) merupakan strategi unggulan Dinas Perdagangan Kota Madiun yang bertujuan menekan angka inflasi dengan memanfaatkan subsidi komoditas pangan. Dalam hal pembiayaan, program Warung Tekan Inflasi mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan-perusahaan.

Program Watek melibatkan dua pihak utama, yaitu pemerintah dan pedagang dimana pemerintah sebagai perencana strategis dan pengawas, sedangkan pedagang sebagai penyalur barang subsidi kepada pembeli. Peran tersebut memberikan pedagang ruang untuk melakukan kecurangan karena adanya *interest gap* dan *information gap*.

Patologis dalam kebijakan publik menggambarkan kebijakan yang dianggap tidak sehat, tidak berfungsi dengan baik, atau memiliki konsekuensi yang merugikan (Mitchell & Simmons, 2021). Patologis pada program warung tekan inflasi merupakan istilah yang mengacu pada kondisi terjadinya biaya yang disediakan untuk kepentingan publik yang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sehingga justru digunakan untuk keuntungan pribadi. Patologis subsidi pada program Wartek berupa subsidi yang tidak tepat sasaran atau penyalahgunaan dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya dan merugikan efisiensi alokatif (Izzati et al., 2023).

Indikasi patologis pada program ini ditunjukkan dengan adanya *gap* antara pencapaian dan proses pelaksanaannya. Anggaran pada program ini mengalami pembengkakan hingga anggarannya mencapai Rp 7.638.455.400,- (7,6 miliar rupiah), sedangkan ketercapaian dari program tersebut masih rendah. Data inflasi tahunan (ytd) dari BPS Kota Madiun mencatat tingkat inflasi Kota Madiun pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,80% (ytd). Tingkat ini dianggap masih terlalu tinggi jika dibandingkan dengan sasaran inflasi berdasarkan PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Sasaran Inflasi tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024. Berdasarkan peraturan tersebut, sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu sebesar 3,0%, 3,0%, dan 2,5%, dengan deviasi  $\pm 1\%$ .

Patologis pada program Warung Tekan Inflasi (Wartek) utamanya terjadi melalui pedagang. Patologis yang terjadi dan stimulannya ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 1.** Patologis pada Program Warung Tekan Inflasi (Wartek)

| Patologis                                                                                                              | Stimulan                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pedagang menjual barang subsidi dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditentukan pemerintah. | 1. Pengawasan yang tidak diatur secara ketat.                                                                 |
| 2. Pembelian berulang untuk dijual kembali.                                                                            | 2. Pasokan barang sulit didapat.                                                                              |
| 3. Barang yang dijual tidak layak.                                                                                     | 3. Intensi pedagang yang mengikuti program Wartek hanya untuk memaksimalkan keuntungan dan mencurangi peluang |
| 4. Timbangan tidak pas.                                                                                                |                                                                                                               |

## APA YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PATOLOGIS PADA PROGRAM WARUNG TEKAN INFLASI?

Pandemi Covid-19 dan Perang Rusia-Ukraina mempengaruhi aspek ekonomi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Meskipun dampak dari pandemi Covid-19 sudah tertahan dengan baik, *supply disruption* yang terjadi akibat dari perang Rusia-Ukraina menjadi tantangan baru bagi Indonesia (Izzeldin et al., 2023). Pemerintah Indonesia merespons dengan mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk mengurangi beban anggaran subsidi yang besar melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No.62 K/12/MEM/2020 per tanggal 3 September 2022. Padahal, kenaikan harga BBM dapat menyebabkan risiko seperti peningkatan kemiskinan (Dartanto, 2013; Izzati et al., 2023) serta terhadap kenaikan tingkat inflasi yang signifikan (Izzati et al., 2023).

Kota Madiun termasuk salah satu kota yang memiliki tingkat inflasi yang cukup tinggi dibandingkan provinsinya. Inflasi Kota Madiun pada 2020 sebesar 1,86 yang lebih tinggi dari inflasi Jawa Timur sebesar 1,44. Tahun berikutnya, inflasi Kota Madiun sebesar 2,00 juga lebih tinggi dari inflasi Jawa Timur 1,75. Inflasi Kota Madiun mencapai 5,8% pada tahun 2022 yang melewati batas standar inflasi yang diatur oleh pemerintah melalui PMK No.101/PMK.010/2021 dimana batas inflasi wajar yaitu di angka 2 hingga 4 persen.

Inflasi memiliki implikasi yang signifikan terhadap stabilitas suatu negara (Hoang Tien, 2021; Yolanda, 2017). Inflasi ringan dan stabil dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong konsumsi dan investasi. Namun, jika inflasi meningkat secara signifikan, dampaknya dapat menjadi negatif. Jika inflasi sangat tinggi maka hal ini menunjukkan bahwa harga-harga barang dan jasa meningkat dengan cepat, dan daya beli masyarakat semakin menurun. Hal ini dapat mengganggu perekonomian secara keseluruhan dan menciptakan ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

Inflasi yang tidak terkendali menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, sehingga bisnis-bisnis mengalami penurunan pendapatan (Bilalli et al., 2024; Hermida & Levy, n.d.; Hilmola, 2021). Apabila terjadi secara masif, maka stabilitas ekonomi akan terganggu, memperbesar kesenjangan pendapatan, dan memperburuk kesulitan kelompok berpenghasilan rendah (Bilalli et al., 2024; Fajardo & Dantas, 2018). Inflasi yang berkelanjutan juga berkontribusi pada penurunan kepuasan finansial masyarakat, yang memperburuk dampak psikologis dan sosial masyarakat yang muncul akibat tekanan ekonomi (Lee et al., 2023).

Pemerintah Kota Madiun melalui Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 50 Tahun 2022 diganti dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2023 memberlakukan program warung tekan inflasi untuk menekan angka inflasi di Kota Madiun. Program Wartek secara teknis dilakukan dengan kerja sama antara pemerintah dengan produsen, BUMN Pangan, dan distributor di luar daerah untuk menyediakan komoditas pangan dengan harga terjangkau. Pemerintah memotong rantai pasokan dengan mempertemukan langsung produsen dengan konsumen.

Program subsidi seperti Wartek berpotensi untuk mengalami kecurangan yang menyebabkan patologis (Ai, 2019; Raghunandan, 2022; Ye & Deng, 2021). Dalam praktik pengadaan subsidi, pemerintah memiliki posisi inferior yang berisiko tinggi mengalami asimetri informasi (Zhang et al., 2018) oleh karena itu pedagang memiliki posisi strategis sebagai perantara pemerintah dan masyarakat sehingga memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak lainnya. *Agency loss* dapat terjadi karena pedagang memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang bertentangan dengan tujuan kebijakan yang seharusnya dijalankan (Hennessy & Wolf, 2018).

Kebijakan subsidi harga memiliki tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan. Subsidi yang tidak tepat sasaran atau penyalahgunaan pada subsidi dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya dan merugikan efisiensi alokatif (Izzati et al., 2023). Selain itu, keberlanjutan fiskal jangka panjang akibat subsidi harga juga perlu dipertimbangkan, karena subsidi yang terlalu besar atau tidak berkelanjutan dapat membebani anggaran pemerintah (Vidican Auktor & Loewe, 2022).



## AGENDA KEBIJAKAN YANG PERLU DILAKUKAN

Program Warung Tekan Inflasi (Wartek) di Kota Madiun merupakan kebijakan strategis untuk mengatasi inflasi dengan menyediakan bahan kebutuhan pokok bersubsidi kepada masyarakat. Namun, implementasi program ini menghadapi sejumlah tantangan, termasuk potensi penyimpangan oleh agen (pedagang) dalam bentuk praktik kecurangan seperti penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET), pengurangan timbangan, atau penjualan barang yang tidak sesuai kualitas. Rekomendasi dalam *policy brief* ini ditujukan kepada Pemerintah Kota Madiun untuk menyempurnakan program melalui penguatan mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas.

Permasalahan strategis dalam program warung tekan inflasi di Kota Madiun adalah adanya *agency loss* akibat asimetri informasi dan *rent-seeking*. Pedagang cenderung menyalahgunakan akses barang subsidi untuk keuntungan pribadi, sehingga tujuan program subsidi tidak tercapai secara maksimal, sementara Pemerintah masih memerlukan perbaikan pada sistem pengawasan yang ada.

Pemerintah bertanggung jawab untuk merancang kebijakan subsidi yang efektif, transparan, dan tepat sasaran. Pemerintah harus memastikan bahwa penerima subsidi benar-benar memerlukan bantuan, dan mekanisme pengawasan dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi apakah subsidi tersebut telah memberikan dampak positif sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Pengawasan terhadap subsidi merupakan langkah krusial terhadap efisiensi dan efektivitas program. Pemerintah-pemerintah di seluruh dunia menerapkan berbagai sistem pengawasan untuk memastikan transparansi dan efektivitas program subsidi. Pemerintah Kota Madiun sebenarnya telah menyiapkan pengawasan terhadap kebijakan subsidi, berikut adalah beberapa langkah tambahan yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan sistem pengawasan yang ada:

1. Mitigasi pada bagian hilir fokus dengan mencegah inefisiensi dan kebocoran biaya pada program subsidi. Pemerintah sebagai penentu alokasi anggaran subsidi perlu melakukan kontrol pasokan barang subsidi pada Program Wartek agar tidak terjadi *over supply*, sehingga melindungi dari risiko kerugian negara. Untuk memastikan bahwa program Wartek tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan analisis permintaan pasar. Pemetaan permintaan ini dilakukan dengan memperhitungkan dinamika pasar dan tren konsumsi, agar pasokan subsidi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan riil tanpa menimbulkan pemborosan.
2. Kualitas subsidi yang disalurkan tetap perlu diperhatikan agar kesehatan masyarakat tetap terjaga. Adanya barang tidak layak yang dijual pada mitra program Wartek perlu ditangani dengan melakukan inspeksi pasar secara rutin. Inspeksi ini dilakukan untuk kualitas barang sembako yang dijual oleh pedagang masih layak dan tidak kadaluwarsa.
3. Penelitian ini mengungkap bahwa minimnya pemahaman Masyarakat terhadap *whistle blowing*, oleh karena itu menyarankan kepada Pemerintah untuk membuat pengumuman dalam bentuk spanduk, atau poster yang menunjukkan secara jelas alur *whistle blowing* pada setiap kios WARTEK agar dipahami masyarakat.
4. Pemerintah Kota Madiun dapat mempertimbangkan pengawasan model kolaborasi dengan komunitas lokal seperti yang telah dilakukan di Brasil. Kolaborasi ini memastikan adanya kepemilikan lokal dalam pelaksanaan program, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan yang dilakukan oleh komunitas setempat.

Masyarakat juga memegang peran penting dalam pengawasan pelaksanaan program Wartek. Sebagai pihak yang langsung terdampak, masyarakat berisiko kehilangan hak-haknya jika terjadi kecurangan dalam program ini. Masyarakat memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa program subsidi berjalan dengan adil dan transparan, sehingga tidak ada penyalahgunaan atau ketidakadilan yang merugikan sebagai penerima manfaat utama. Masyarakat dapat memerhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Masyarakat yang menemukan kuantitas tidak sesuai timbangan atau kualitas yang sudah tidak layak namun dijual oleh mitra program Wartek dapat melaporkan melalui *call center* 112 atau melapor pada Dinas Perdagangan apabila menemukan kecurangan dari pihak pedagang.
2. Masyarakat dapat meminta nota atau bukti transaksi dan melaporkan jika harga yang dijual tidak sesuai dengan ketentuan program Wartek dan melaporkannya.
3. Masyarakat perlu menyadari hak dan kewajiban sebagai pembeli dan berperan aktif mengawasi dan mendorong transparansi dari pedagang dalam program Wartek.
4. Masyarakat disarankan untuk membeli barang pada pedagang terafiliasi program Wartek secara bijak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, agar distribusi subsidi terjadi secara adil dan tepat sasaran.

## REFERENSI

- Ai, Z. (2019). Enterprise's innovation behavior choice under the government subsidy--Analysis based on signaling game. *Ekoloji*, 28(107), 2369–2376.
- Bilalli, A., Sadiku, M., & Sadiku, L. (2024). the Impact of Inflation on Financial Sector Performance: Evidence From Oecd Countries. *ECONOMICS - Innovative and Economics Research Journal*, 12(2), 263–276. <https://doi.org/10.2478/eoik-2024-0028>
- Dartanto, T. (2013). Reducing fuel subsidies and the implication on fiscal balance and poverty in Indonesia: A simulation analysis. *Energy Policy*, 58, 117–134. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.02.040>
- Fajardo, J., & Dantas, M. (2018). Understanding the impact of severe hyperinflation experience on current household investment behavior. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 17, 60–67. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2017.12.008>
- Hennessey, D. A., & Wolf, C. A. (2018). Asymmetric Information, Externalities and Incentives in Animal Disease Prevention and Control. *Journal of Agricultural Economics*, 69(1), 226–242. <https://doi.org/10.1111/1477-9552.12113>
- Hermida, L., & Levy, H. (n.d.). *the Uneven Impact of High Inflation Oecd Papers on Well-Being* (Issue 18).
- Hilmola, O. P. (2021). Inflation and Hyperinflation Countries in 2018–2020: Risks of Different Assets and Foreign Trade. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(12). <https://doi.org/10.3390/jrfm14120618>
- Hoang Tien, N. (2021). Relationship between inflation and economic growth in Vietnam. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(14), 5134–5139.
- Izzati, R. Al, Yusrina, A., & Suryahadi, A. (2023). *Estimating the effect of a fuel price increase on poverty and inequality: Evidence from a fuel subsidy reduction in Indonesia*. 1, 1–7.
- Izzeldin, M., Muradoğlu, Y. G., Pappas, V., Petropoulou, A., & Sivaprasad, S. (2023). The impact of the Russian-Ukrainian war on global financial markets. *International Review of Financial Analysis*, 87, 102598. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102598>
- Lee, B., Kim, H., & Tavakoli, A. (2023). The impact of economic growth, inflation and unemployment on subjective financial satisfaction: A New global evidence. *Cogent Economics and Finance*, 11(2). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2287908>
- Raghuandan, A. (2022). Government subsidies and corporate Fraud. *Journal of Accounting and Economics*, 74(1). <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2022.101480>
- Vidican Auktor, G., & Loewe, M. (2022). Subsidy Reform and the Transformation of Social Contracts: The Cases of Egypt, Iran and Morocco. *Social Sciences*, 11(2), 85. <https://doi.org/10.3390/socsci11020085>
- Ye, F., & Deng, Q. (2021). Strategies for poverty alleviation supply chain with government subsidies and misreporting behavior in China. *PLoS ONE*, 16(7 July 2021), 1–19. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253761>
- Yolanda, Y. (2017). Analysis of factors affecting inflation and its impact on human development index and poverty in Indonesia. *European Research Studies Journal*, 20(4), 38–56. <https://doi.org/10.35808/ersj/873>
- Zhang, X., Zhang, S., & Jiao, S. (2018). Game between Government and Developers under the Subsidy Policy of Prefabricated Buildings. *ICCREM 2018*, 153–160.